

BAB V

VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2013-2018. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.

5.1 Visi

Visi Provinsi Jawa Tengah merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2013-2018. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Jawa Tengah yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2018 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah :

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah, memperhatikan RPJMN, dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan *“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”* Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sejahtera

Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana, supra infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kelmatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati.

Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
2. Mengeksplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
3. Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Pada era globalisasi, bidang-bidang terkait komunikasi dan informatika, perdagangan, jasa produksi, teknologi, hiburan, transportasi, pariwisata dan tenaga kerja tidak lagi terhalangi oleh jarak dan batas-batas wilayah administrasi. Berdikari harus tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mengingkari realitas globalisasi atau mengisolasi diri dan menutup peluang kerjasama dengan berbagai pihak di Indonesia dan dunia.

Potensi Jawa Tengah lainnya adalah rakyat Jawa Tengah yang tersebar di berbagai pelosok tanah air dan penjuru dunia sebagai promotor dalam mencari mitra kerjasama strategis di bidang perdagangan, jasa, produksi, pariwisata, tenaga kerja, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bidang terkait lainnya. Prinsip Berdikari adalah membuka ruang bagi seluruh rakyat Jawa Tengah untuk dapat mengakses dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Selain itu juga memfasilitasi akses rakyat terutama rakyat kecil untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan prinsip sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan ruang publik untuk mempromosikan temuan, karya dan produk rakyat. Hal ini merupakan upaya untuk mengubah ketidakberdayaan rakyat hingga mampu berdiri di atas kaki sendiri, bukan memberikan ikan tetapi memberikan "kail dan jala". Dengan kata lain memberikan pengetahuan, keterampilan, dan peluang untuk pengembangan diri masyarakat secara maksimal sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan, dan

potensi bagi pemenuhan kebutuhan produksi, jasa, maupun potensi ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat.

Selain itu berdikari dapat diartikan sebagai suatu kondisi terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensi ekonomi, politik, sosial, budaya melalui kerjasama dan sinergitas. Prinsip ini ditunjukkan dengan tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah perkotaan yang bersinergi; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas politik daerah.

Berdikari hanya akan dicapai dengan sistem dan tata kelola pemerintahan yang mampu memproteksi daerahnya dari intervensi pihak luar yang merugikan rakyat Jawa Tengah, membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat terutama rakyat kecil untuk dapat mengakses aset Jawa Tengah, memberikan jaminan kepada rakyat terutama rakyat kecil untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan Jawa Tengah. Sistem tata kelola yang demikian membutuhkan aparatur pemerintah yang mempunyai sikap, tindakan, dan perilaku sebagai pelayan masyarakat yang dilandasi semangat dan nilai keutamaan "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*".

Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "*Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*" merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*".

5.2 Misi

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

1. Membangun Jasa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonoiml, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan

Misi pertama merupakan kerangka acuan bagi enam misi lainnya dengan mentransformasikan nilai Trisakti dalam setiap misi. Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah memiliki karakter berbasis pada nilai ideologis Trisakti Bung Karno yaitu Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan. Landasan Trisakti ini perlu juga diaktualisasikan sebagai respon atas perubahan situasi global yang memiliki dampak pada posisi kedaulatan negara, khususnya kedaulatan atas pangan dan energi sebagai prasyarat keberdikarian sebuah bangsa.

Kedaulatan pangan dan energi sebagai pengejawantahan bangunan Trisakti akan memberikan implikasi bukan saja berdikari di bidang ekonomi, namun juga akan melahirkan karakter politik yang lebih berdaulat, dan melebur pada bangunan karakter rakyat Jawa Tengah dengan melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya Jawa.

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, pengendalian alih fungsi lahan yang didukung dengan reformasi agraria, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi.

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan penguatan kelembagaan sosial masyarakat melalui pelibatan kelembagaan sosial dalam proses perencanaan partisipatif, revitalisasi kearifan lokal yang diadopsi dalam proses komunikasi politik, serta peningkatan peran dan fungsi seni budaya.

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, serta sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah.

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Misi ini diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, permukiman, jaringan irigasi dan air baku melalui perluasan akses dan penyediaan prasarana dan sarana serta pemenuhan standar pelayanan minimal.

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2013-2018. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Buag Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan

Tujuan : Memberikan haluan pada 6 (enam) misi yang lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno.

Sasaran : Meningkatkan demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Trisakti Bung Karno.

2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

Tujuan :

- a. Menurunkan jumlah penduduk miskin;
- b. Menurunkan jumlah penganggur;
- c. Mengembangkan Koperasi dan UMKM;
- d. Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui Kedaulatan pangan dan Kedaulatan Energi;
- e. Meningkatkan kelembagaan ekonomi pedesaan;
- f. Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri;
- g. Meningkatkan iklim dan pengembangan investasi;
- h. Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan;
- i. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS.

Sasaran :

- a. Menurunnya angka kemiskinan;
- b. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka;
- c. Terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal;
- d. Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal;
- e. Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan UMKM;
- f. Meningkatnya kelembagaan ekonomi pedesaan;
- g. Meningkatnya lmalitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas;

- h. Meningkatnya realisasi investasi;
- i. Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak;
- j. Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
- k. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan;
- l. Meningkatnya kualitas dan keterampilan masyarakat;
- m. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM.

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Tujuan :

- a. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima;
- b. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel;
- c. Melaksanakan penegakan hukum.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan provinsi;
- b. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jelas;
- c. Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- e. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan;
- f. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- g. Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini wajar Tanpa Pengecualian;
- h. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern pemerintah;
- i. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4. Mempertuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan

Tujuan :

- a. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;
- b. Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat;
- c. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat;
- d. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan.

Sasaran :

- a. Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;
- b. Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa;

- c. Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik;
- d. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
- e. Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi;
- f. Meningkatnya keterwakilan perempuan di dalam politik;
- g. Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya Jawa;
- h. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa;
- i. Meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat.

5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Tujuan :

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- b. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat.

Sasaran :

- a. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- b. Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah;
- c. Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah.

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Tujuan :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. Meningkatkan budaya baca masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
- e. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas.

Sasaran :

- a. Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan;
- b. Menurunnya Drop Out (DO) KB dan *Unmet Need* serta meningkatnya peserta KB aktif/ *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR);
- c. Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan;
- d. Meningkatnya kualitas pendidikan;
- e. Meningkatnya budaya baca masyarakat;
- f. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni;
- g. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat.

7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Tujuan :

- a. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;

- b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi;
- c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan;
- d. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;
- b. Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi;
- c. Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di muara sungai;
- d. Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat;
- e. Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi;
- f. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan;
- g. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.